

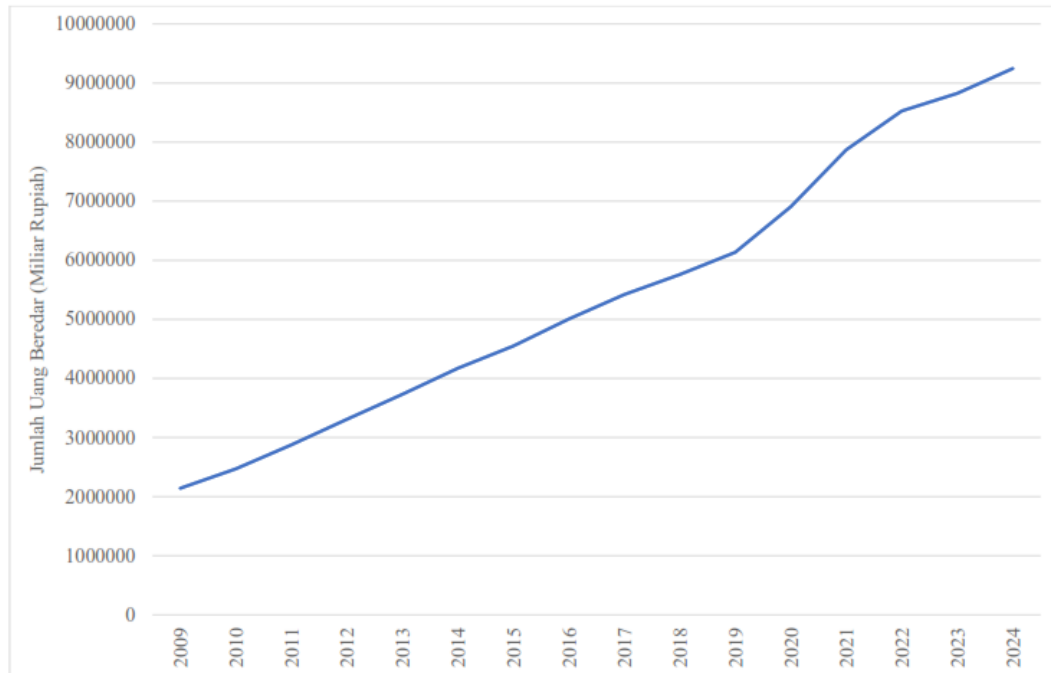
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan signifikan dalam ekonomi dan kehidupan sosial, mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari. Teknologi menjadi katalisator utama dalam meningkatkan potensi masyarakat dan kesejahteraan nasional (Yusuf & Kristiyanto, 2022). Sejalan dengan itu, kemajuan teknologi internet juga mengalami peningkatan pesat. Berdasarkan laporan dari World Bank (2025), penetrasi pengguna internet di Indonesia menunjukkan tren peningkatan secara konsisten setiap tahun hingga mencapai 72,78% dari total populasi pada tahun 2024. Peningkatan akses internet secara signifikan mendorong pertumbuhan sistem pembayaran elektronik. Kehadiran sistem ini menawarkan transaksi non-tunai yang aman, cepat, efisien, dan bersifat global, sekaligus menghemat waktu dan tenaga pengguna (Sudirjo et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan ekonomi digital yang pesat, jumlah uang beredar di Indonesia turut memperlihatkan tren pertumbuhan yang konsisten selama periode 2009-2024. Berdasarkan data Bank Indonesia (2025b), jumlah uang beredar meningkat signifikan dari Rp2.141 triliun pada tahun 2009 hingga mencapai Rp9.247 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh lebih dari empat kali lipat dalam kurun waktu 15 tahun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. Lonjakan paling tajam terjadi pada periode 2020-2022, yakni dari Rp6.906 triliun menjadi Rp8.528 triliun, yang bertepatan dengan akselerasi adopsi transaksi digital selama dan pandemi COVID-19. Ekspansi likuiditas yang terus berlangsung ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang salah satunya tercermin dari pergeseran perilaku transaksi dari penggunaan uang tunai menuju mekanisme pembayaran non-tunai. Dalam konteks teori kuantitas uang, peningkatan jumlah uang beredar berpotensi menimbulkan tekanan inflasi apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan output riil yang sebanding (Mankiw, 2009).



Sumber: Bank Indonesia (2025b)

Gambar 1.1 Jumlah Uang Beredar di Indonesia Periode 2009-2024 (Miliar Rupiah)

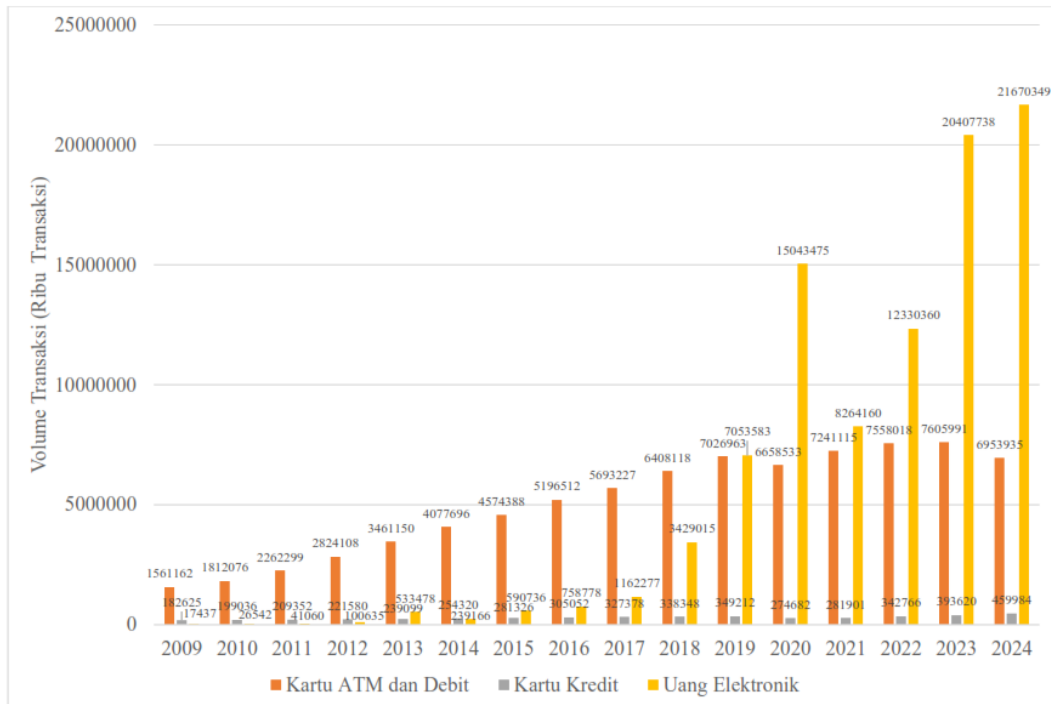
Sejak tahun 2014, Bank Indonesia menginisiasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sebagai sebuah kerangka kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen transaksi non-tunai dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai instrumen pembayaran non-tunai, meliputi kartu debit atau mesin anjungan tunai (ATM), kartu kredit, serta uang elektronik berbasis aplikasi, difungsikan sebagai media transaksi yang mendukung implementasi program GNNT (Anggraini, 2021). Dalam konteks mendorong integrasi ekonomi digital dan modernisasi sistem keuangan nasional, Bank Indonesia turut menjalankan program elektronifikasi yang pada dasarnya merupakan upaya transformasi sistematis dari pola transaksi berbasis uang tunai menuju mekanisme pembayaran digital (Bank Indonesia, 2022). Dengan demikian, pelaksanaan GNNT secara konsisten berpotensi mewujudkan ekosistem masyarakat tanpa tunai (*cashless society*), seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya adaptasi terhadap transformasi digital di sektor keuangan.

Perkembangan sistem pembayaran elektronik tersebut telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Perubahan pola dari penggunaan uang tunai ke mekanisme non-tunai ini memunculkan fenomena yang diidentifikasi sebagai *cashless society*. Sebagai bentuk adopsi kolektif yang juga terjadi secara global, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembayaran elektronik mendorong terbentuknya *cashless society*, yang dapat terwujud jika masyarakat mampu mengadopsi teknologi pembayaran modern dengan baik (Hidayah et al., 2023; Yakean, 2020; Balakrishnan & Shuib, 2021; Abdullah et al., 2020).

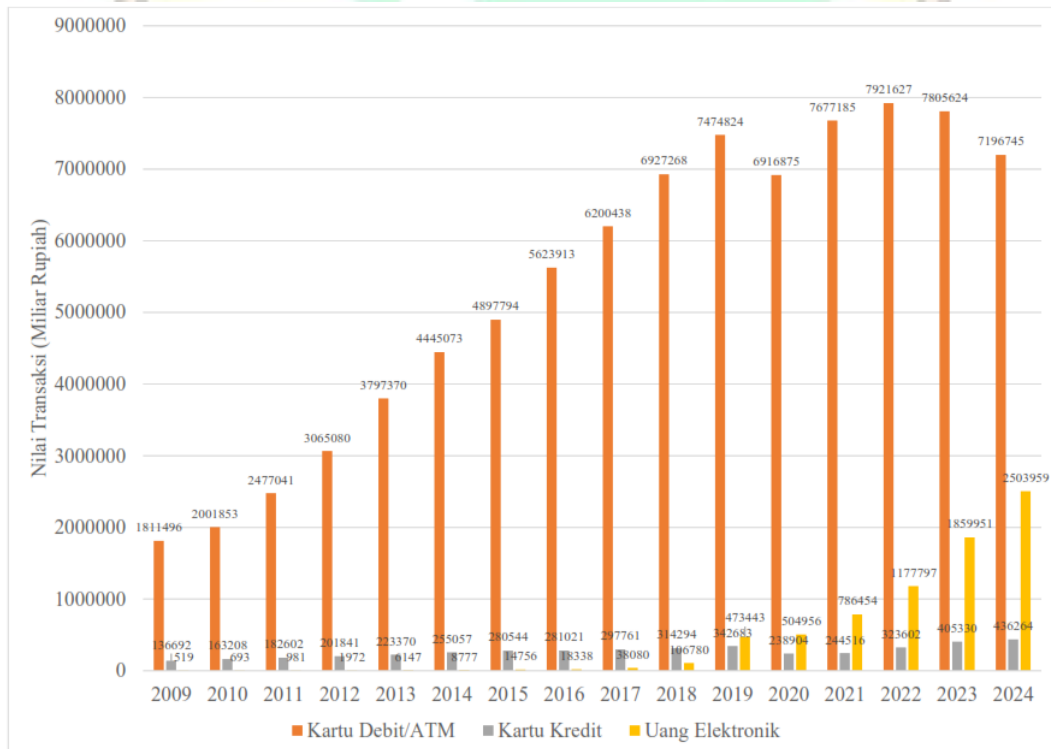
Bersamaan dengan perkembangan massif ekonomi digital dan inovasi di sektor finansial, Indonesia memperlihatkan peningkatan yang signifikan dalam adopsi mekanisme pembayaran non-tunai. Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai otoritas moneter telah menerbitkan kebijakan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* dan mengenalkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada tahun 2019 sebagai instrumen utama dalam mengintegrasikan ekosistem pembayaran digital nasional. Aplikasi QRIS berkontribusi dalam mendorong adopsi transaksi digital oleh para pelaku usaha termasuk UMKM, serta meningkatkan tingkat efisiensi dan keamanan dalam transaksi pembayaran (Bank Indonesia, 2020c).

Bank Indonesia (2020d) mengidentifikasi bahwa instrumen pembayaran non-tunai utama di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik. Kategori Alat Pembayaran Menggunakan Kartu mencakup kartu ATM, kartu debit, serta kartu kredit. Peningkatan transaksi pembayaran non-tunai yang terjadi sejak tahun 2009 mencerminkan adanya pergeseran perilaku publik, yang kini lebih memilih pembayaran digital daripada tunai seperti pada Gambar 1. Namun, peningkatannya tidak berlangsung secara merata. Transaksi kartu ATM dan debit mengalami kenaikan yang stabil dan konsisten, sedangkan kartu kredit cenderung stagnan karena penggunaannya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses terhadap fasilitas perbankan formal. Sementara itu, instrumen uang elektronik memperlihatkan pertumbuhan transaksi yang paling signifikan di antara ketiga jenis instrumen pembayaran non-tunai, terutama sejak tahun 2017.

(a) Volume Transaksi Pembayaran Non-tunai



(b) Nilai Transaksi Pembayaran Non-tunai



Sumber: Bank Indonesia (2025b)

Gambar 1.2 Perbandingan Volume dan Nilai Transaksi Pembayaran Non-tunai di Indonesia Periode 2009-2024 (Ribu Transaksi dan Miliar Rupiah)

Dinamika transaksi pembayaran non-tunai di Indonesia menunjukkan karakteristik yang berbeda. Ketika ditinjau dari dua dimensi pengukuran, yaitu volume dan nilai transaksi. Gambar 1.2 memperlihatkan perbandingan antara volume dan nilai transaksi untuk tiga instrumen pembayaran non-tunai, yaitu kartu debit/ATM, kartu kredit, dan uang elektronik. Dari sisi volume transaksi pada panel (a), uang elektronik mengalami pertumbuhan yang sangat tajam mencapai lebih dari 21 juta transaksi pada tahun 2024, melampaui volume transaksi kartu debit/ATM yang hanya sekitar 7 juta transaksi pada periode yang sama. Namun, ketika ditinjau dari nilai transaksi pada panel (b), uang elektronik hanya mencatat sekitar 2,5 miliar rupiah, masih berada di bawah nilai transaksi kartu debit/ATM yang mencapai 7,5 miliar rupiah. Disparitas ini mengindikasikan bahwa rata-rata nilai transaksi uang elektronik jauh lebih rendah dibandingkan instrumen kartu, yang menunjukkan bahwa uang elektronik lebih dominan digunakan untuk transaksi mikro bernilai kecil dengan frekuensi sangat tinggi.

Uang elektronik dipilih sebagai variabel utama dalam penelitian ini karena instrumen ini merefleksikan dinamika terkini dari transformasi sistem pembayaran di Indonesia. Pertumbuhan pesatnya tidak hanya mengindikasikan pergeseran preferensi masyarakat menuju instrumen pembayaran non-tunai berbasis teknologi, tetapi juga didorong oleh faktor kemajuan inovasi finansial, kebijakan pemerintah, serta meningkatnya adopsi teknologi dan akses internet di berbagai segmen masyarakat. Dengan demikian, uang elektronik dianggap sebagai representasi paling kuat dalam mengukur kemajuan dan dampak sistem pembayaran non-tunai pada perekonomian Indonesia.

Transformasi digital pada sistem pembayaran terbukti memberikan pengaruh terhadap pola pengambilan keputusan konsumen dalam aktivitas belanja. Adopsi teknologi pembayaran modern menjadikan proses transaksi berlangsung lebih efisien, praktis, serta tidak terikat oleh keterbatasan ruang maupun waktu, sehingga kondisi tersebut berimplikasi pada kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan ketika mengandalkan metode pembayaran konvensional berbasis uang tunai. Penggunaan *digital payments* sering kali dikaitkan dengan peningkatan pengeluaran konsumen karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkannya; ketika konsumen tidak

merasakan “rasa kehilangan” uang secara fisik seperti saat membayar tunai, dorongan untuk melakukan pembelian impulsif cenderung meningkat, yang dapat memperluas belanja konsumen secara keseluruhan (Agarwal et al., 2024)

Perubahan pola belanja konsumen tersebut memiliki implikasi makroekonomi yang lebih luas. Ketika konsumsi rumah tangga meningkat sebagai respons terhadap semakin luasnya penggunaan pembayaran digital, permintaan agregat dalam perekonomian dapat terdorong naik, yang pada gilirannya dapat menimbulkan tekanan inflasi dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*) jika pertumbuhan permintaan melebihi kemampuan produksi barang dan jasa. Perubahan ini juga berkaitan dengan bagaimana *digital payment* meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses ke pasar digital, dan mengubah pola perilaku pembelian masyarakat secara keseluruhan, yang semuanya berdampak pada dinamika aktivitas ekonomi dan pergeseran permintaan barang dan jasa (Birigozzi et al., 2025).

Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator utama yang lazim digunakan dalam mengukur stabilitas perekonomian suatu negara (Soraya & Abbas, 2022). Bank Indonesia menegaskan bahwa kondisi inflasi yang rendah dan terkendali merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas (Bank Indonesia, 2020d). Faktanya, menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil adalah pekerjaan yang penuh kompleksitas karena laju inflasi ditentukan oleh berbagai faktor yang saling terkait, mencakup dimensi moneter, sektor produktif, serta evolusi perilaku ekonomi di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, inflasi tidak semata-mata berfungsi sebagai indikator kestabilan ekonomi, melainkan juga mencerminkan kompleksitas dari dinamika perekonomian yang terus mengalami perubahan secara berkelanjutan.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang bersifat multidimensional dan hingga kini masih menjadi objek kajian yang insentif dalam bidang ekonomi. Dampaknya dirasakan secara langsung dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari dan kerap menimbulkan respons emosional yang kuat di kalangan publik (Binetti et al., 2024). Kondisi inflasi yang tinggi maupun tidak stabil berpotensi mengganggu kestabilan harga barang dan jasa, sehingga dapat mengikis kepercayaan konsumen

sekaligus menghambat akselerasi dinamika perekonomian secara keseluruhan. Dengan mengimplementasikan kebijakan moneter yang konsisten dan terukur, stabilitas harga dapat dipertahankan dan kepercayaan konsumen dapat ditingkatkan (Sekarsari et al., 2024).

Pandangan yang menempatkan inflasi sebagai persoalan yang berakar pada aspek moneter sesungguhnya bersumber dari pemikiran ekonomi klasik. Teori tersebut mengemukakan bahwa inflasi timbul manakala jumlah yang beredar di masyarakat melampaui kebutuhan atau permintaan terhadap uang itu sendiri. Dalam kondisi keseimbangan, volume uang yang tersedia seharusnya sepadan dengan jumlah uang yang dibutuhkan dalam perekonomian. Kaum Monetaris meyakini bahwa uang memegang peranan sentral dalam membentuk tingkat pendapatan maupun harga dalam suatu perekonomian, mereka berargumentasi bahwa fluktuasi dalam jumlah uang beredar merupakan faktor determinan utama yang mendorong perubahan pada tingkat pendapatan dan harga secara agregat. Dengan demikian, inflasi dipandang sebagai fenomena yang senantiasa memiliki akar kausalitas pada permasalahan di ranah moneter (Nathan, 2023).

Fenomena inflasi di Indonesia disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan persisten. Menurut Bank Indonesia (2020b), struktur inflasi Indonesia diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terdiri atas sebelas kelompok pengeluaran utama, yaitu: makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; perlengkapan rumah tangga; kesehatan; transportasi; informasi dan komunikasi; rekreasi; pendidikan; penyediaan makanan dan minuman; serta kesehatan. Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan kontribusi masing-masing kelompok terhadap inflasi nasional selama lima tahun terakhir berdasarkan klasifikasi kelompok pengeluaran dalam Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tabel 1.1 Indeks Harga Konsumen di Indonesia Tahun 2020-2024

Kelompok IHK	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,49	1,61	1,57	1,07	1,33
Pakaian dan Alas Kaki	0,03	0,22	0,09	0,18	0,11
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,03	0,10	0,63	0,01	0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,08	0,24	0,15	0,10	0,03
Kesehatan	0,19	0,16	0,14	0,04	0,35
Transportasi	0,46	0,62	0,45	0,45	0,04
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,01	-0,10	-0,06	0,07	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,01	0,10	0,23	0,54	0,09
Pendidikan	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,27	0,24	0,14	0,03	0,17
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0,29	0,25	0,66	0,46	0,26

Sumber: Bank Indonesia (2025a)

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa hampir semua kelompok menampilkan fluktuasi dalam skala kecil pada basis tahunan, yang demikian terdapat tiga kelompok yang berperan sebagai kontributor utama inflasi nasional. Pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menempati posisi tertinggi pada tahun 2020-2024 dengan kontribusi antara 1,07 hingga 1,61 persen, mencerminkan dominasi komoditas pangan dalam pembentukan inflasi Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan gangguan pasokan (Antara News, 2025; CNBC Indonesia, 2025a; TEMPO, 2025). Kedua, kelompok transportasi menunjukkan kontribusi cukup besar, terutama pada tahun 2021-2022 yang mencapai sekitar 0,46-0,62 persen, sejalan dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum (DDTC News, 2023; KOMPAS, 2022a, 2022b). Ketiga, kelompok kesehatan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 sebesar 0,35 persen yang menunjukkan meningkatnya biaya jasa dan pengobatan. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia (2025b), salah satu faktor yang mendorong tingginya inflasi pada kelompok kesehatan adalah tingginya

ketergantungan industri farmasi nasional terhadap bahan baku obat impor, yang mencapai sekitar 90 persen.

Berdasarkan komponen Indeks Harga Konsumen (IHK) selama periode 2020 hingga 2024, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, serta kesehatan menjadi kontributor utama inflasi. Sementara kelompok lainnya seperti pendidikan, pakaian dan alas kaki, serta penyediaan makanan atau restoran memberikan kontribusi yang relatif kecil dan stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa inflasi di Indonesia erat kaitannya dengan aktivitas konsumsi rumah tangga dan kelancaran sistem pembayaran, sehingga perkembangan instrumen pembayaran modern menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks stabilitas harga.

Selain pertimbangan kontribusi empiris terhadap inflasi nasional, pemilihan ketiga kelompok tersebut juga didasarkan pada aspek konsistensi klasifikasi data. Sejak tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pembaruan klasifikasi pengelompokan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan mengadopsi standar *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) 2018. Perubahan ini menyebabkan adanya penyesuaian struktur dan komposisi beberapa kelompok pengeluaran dalam IHK, sehingga tidak seluruh kelompok memiliki keseragaman definisi dan cakupan yang sepenuhnya sebanding dengan periode sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2022). Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi metodologis serta menghindari potensi distorsi akibat perubahan klasifikasi, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga kelompok inflasi yang relatif stabil secara definisi dan memiliki kontribusi dominan selama periode observasi, yaitu makanan, minuman, dan tembakau; transportasi; serta kesehatan.

Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya inflasi yang rendah dan stabil sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pada saat yang sama, Bank Indonesia juga secara aktif mendorong perluasan transaksi non tunai melalui berbagai inisiatif seperti Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), pengembangan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), serta percepatan elektronifikasi sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2024b). Perluasan penggunaan uang elektronik berpotensi meningkatkan kemudahan dan kecepatan transaksi, mempercepat perputaran uang, serta mendorong aktivitas konsumsi masyarakat,

yang secara teoritis dapat menimbulkan tekanan inflasi dari sisi permintaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan empiris mengenai bagaimana hubungan antara transaksi uang elektronik dan inflasi di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, pengaruh uang elektronik terhadap inflasi tidak dapat dipandang sebagai hubungan yang bersifat statis, melainkan perlu dianalisis berdasarkan dimensi waktu. Pada *long run*, harga bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan dan penawaran akibat perkembangan sistem pembayaran. Sebaliknya, pada keadaan *short run*, harga cenderung kaku sehingga perubahan dalam transaksi uang elektronik belum sepenuhnya tercermin dalam tingkat harga, melainkan terlebih dahulu memengaruhi variabel riil seperti konsumsi dan kecepatan perputaran uang (Mankiw, 2009). Dengan demikian, analisis antara *short run* dan *long run* diperlukan untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana uang elektronik memengaruhi inflasi di Indonesia.

Prabheesh et al. (2024) menganalisis pengaruh utang publik dan transaksi non-tunai terhadap inflasi di 10 negara *emerging market economies* selama periode Januari 2020 hingga Desember 2022 menggunakan metode *Panel Vector Autoregression* (PVAR). Studi tersebut menemukan bahwa peningkatan utang pemerintah dan penggunaan transaksi digital mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menimbulkan tekanan inflasi, dengan dampak paling signifikan pada kelompok pakaian dan alas kaki, transportasi, serta energi. Berbeda dengan Prabheesh et al. (2024), penelitian ini memfokuskan analisis secara spesifik pada Indonesia dengan beberapa perbedaan mendasar: pertama, menggunakan variabel volume transaksi uang elektronik, suku bunga, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih menekankan faktor moneter dibandingkan faktor fiskal; kedua, menganalisis kelompok inflasi dengan kontribusi tertinggi di Indonesia yaitu makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, serta kesehatan yang mencerminkan struktur konsumsi domestik; ketiga, memperpanjang periode pengamatan dari Januari 2009 hingga Juli 2025 untuk menangkap dinamika *long run* dan siklus ekonomi yang lebih komprehensif, tidak terbatas pada periode pandemi. Untuk analisis lebih lanjut, maka dilakukan

penelitian yang berjudul “**Hubungan Kausalitas Transaksi Uang Elektronik dan Inflasi di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan transaksi uang elektronik dengan tingkat inflasi umum di Indonesia dalam *short run* dan *long run*?
2. Bagaimana hubungan transaksi uang elektronik dengan tiga kelompok utama penyumbang inflasi terbesar di Indonesia dalam *short run* dan *long run*?
3. Bagaimana peningkatan transaksi uang elektronik berkontribusi terhadap tiga kelompok utama penyumbang inflasi terbesar di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan transaksi menggunakan uang elektronik dengan tingkat inflasi di Indonesia dalam *short run* dan *long run*.
2. Untuk menganalisis hubungan transaksi menggunakan uang elektronik dengan tiga kelompok utama penyumbang inflasi terbesar di Indonesia dalam *short run* dan *long run*.
3. Untuk menganalisis kontribusi transaksi uang elektronik terhadap tiga kelompok utama penyumbang inflasi terbesar di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan cakupan pemahaman ilmiah dan menyediakan landasan untuk perumusan metodologi serta instrumen kebijakan yang efektif. Kegunaan dari studi ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa poin berikut ini:

1. Manfaat terhadap instrumen kebijakan

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan utama bagi institusi maupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan sistem pembayaran, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan transaksi non-tunai berbasis uang elektronik.

2. Manfaat terhadap akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pengayaan terhadap literatur yang sudah ada, sekaligus membuka ruang bagi munculnya topik maupun pertanyaan penelitian baru yang dapat menstimulasi pengembangan kajian lebih lanjut di bidang pembayaran non-tunai.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menelaah bagaimana keterkaitan antara transaksi uang elektronik terhadap inflasi, serta mengidentifikasi kontribusinya pada tiga kelompok utama penyumbang inflasi terbesar di Indonesia, dengan rentang periode penelitian yang mencakup Januari 2009 hingga Juli 2025. Adapun tiga kelompok penyumbang inflasi utama yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini meliputi kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok transportasi, serta kelompok kesehatan.